

Temuan Survei Pandangan Masyarakat terhadap Keberadaan KPK dalam pemberantasan Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW)

www.antikorupsi.org

Jakarta, 26 November 2015

Latar Belakang

- Proses seleksi calon pimpinan KPK
- Masyarakat harus berpartisipasi dalam proses seleksi calon pimpinan KPK
- DPR harus melihat pandangan masyarakat terkait proses seleksi capim KPK



Tujuan Survei

Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kelembagaan, kinerja, dan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi



Metode

- Survei
- Wawancara langsung
- *Partially open question*
- Teknik sampling yang digunakan adalah *two stage random sampling*
- Total responden 1500
- Margin of error 2% - 3%
- Tingkat signifikansi 95%

kriteria responden:

- Berusia minimal 17 tahun
- Harus ada keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam 1 kelurahan
- Berasal dari 3 RW berbeda
- Dilarang untuk mewawancarai responden yang tinggal satu rumah atau berdempetan rumahnya.



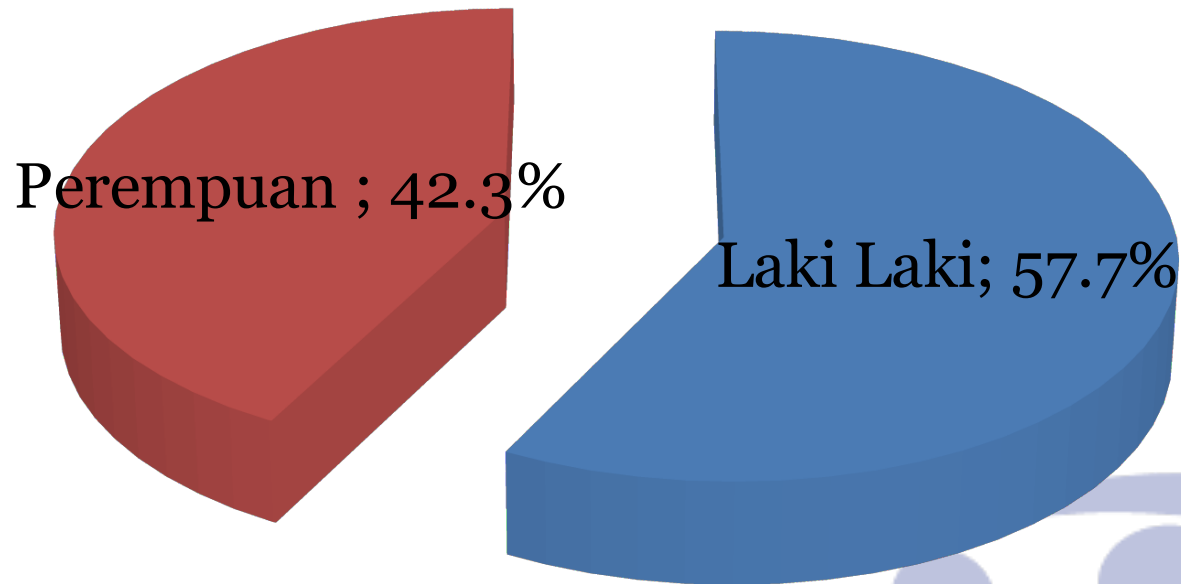
Waktu dan Tempat

- 26 Oktober sampai 20 November 2015 di lima kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan

No	Kota	Jumlah Kelurahan	Responden
1	Jakarta	51	510
2	Bandung	29	290
3	Surabaya	27	270
4	Medan	24	240
5	Makassar	19	190
	Total	150	1.500

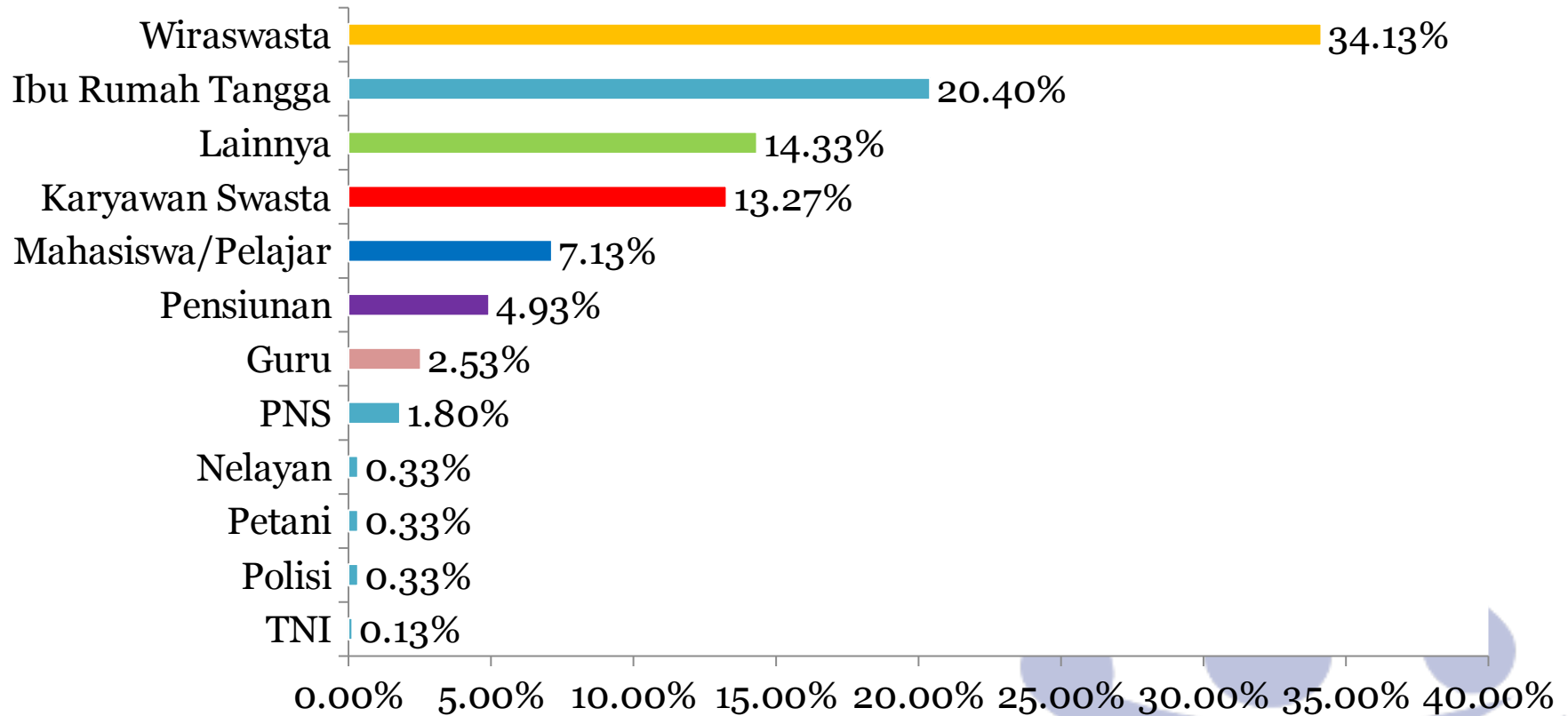
Profil Responden

Jenis Kelamin



Jumlah laki-laki dengan perempuan dalam survei ini dapat dikatakan sebanding karena dari 1500 responden, sebanyak 42,3% adalah perempuan dan 5,7,7% adalah laki-laki.

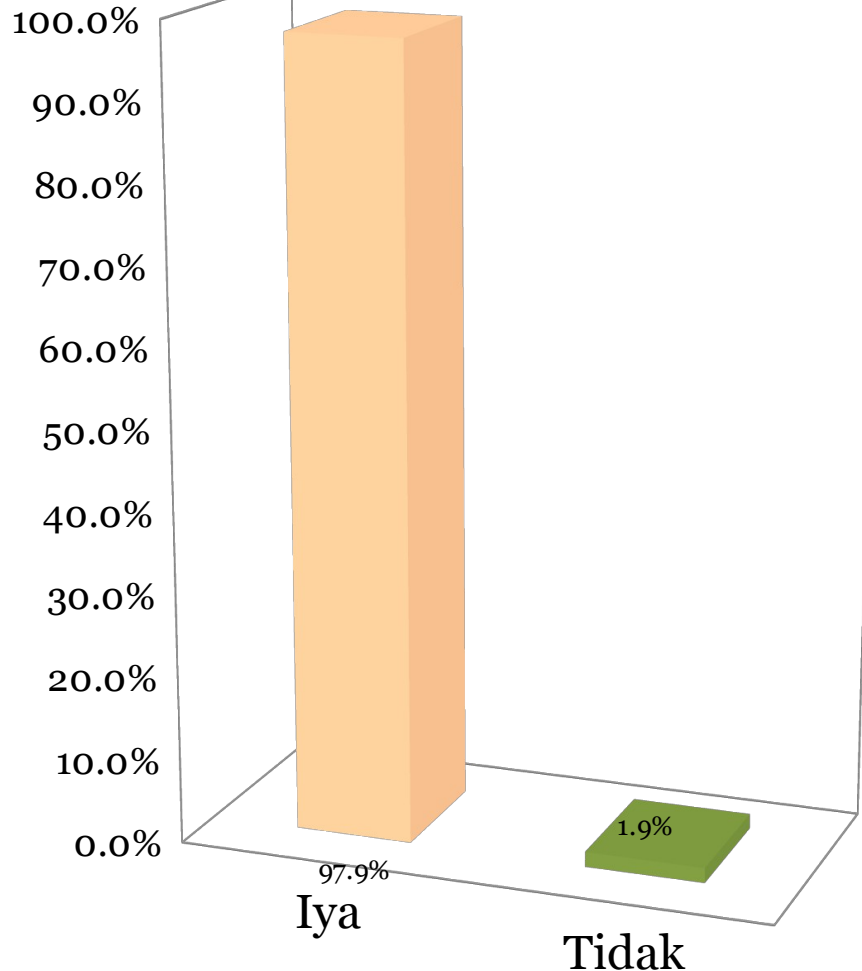
Latar Belakang Pekerjaan



Berdasarkan latar belakang pekerjaannya, sebanyak 34,13% merupakan wiraswasta, sebanyak 20,4% ibu rumah tangga, sebanyak 13,27% karyawan swasta, sebanyak 7,13% mahasiswa/pelajar, sebanyak 4,93% pensiunan, sebanyak 2,53% guru, dan PNS sebanyak 1,8%. Sedangkan sisanya 0,13% sampai 0,33% adalah nelayan, petani, polisi, dan TNI.

Temuan Survei

Apakah keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

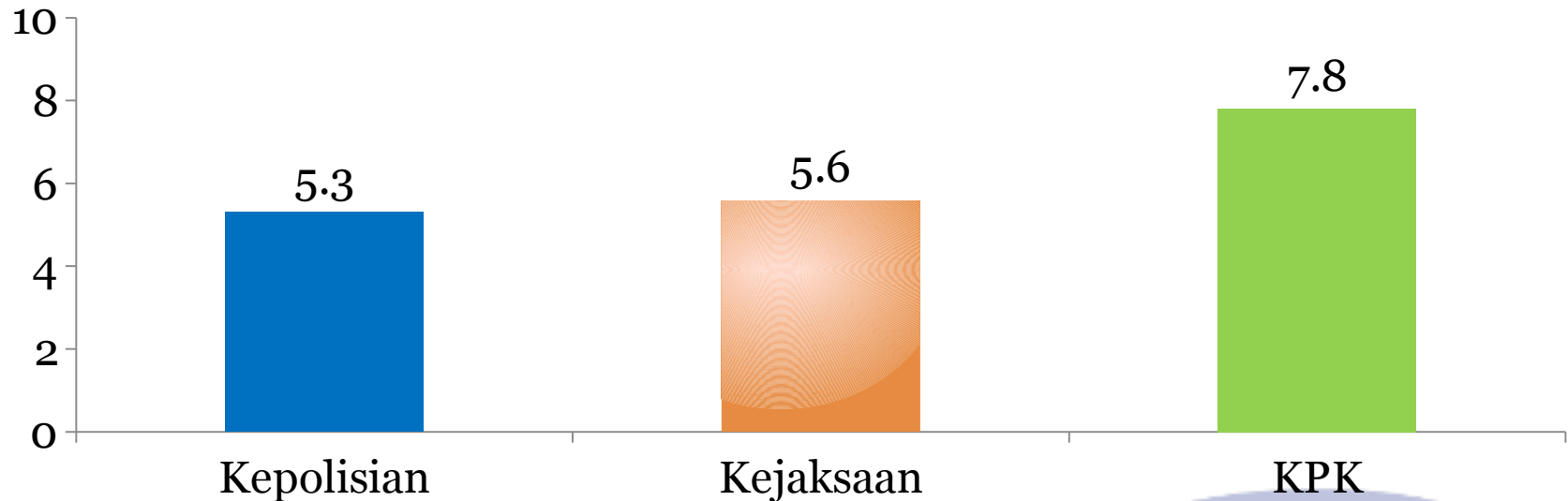


Dari 1500 responden, ternyata 97,9% menganggap bahwa KPK dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan hanya 1,9% yang menyatakan tidak membutuhkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

Sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas masyarakat masih membutuhkan KPK untuk menangani korupsi di Indonesia.

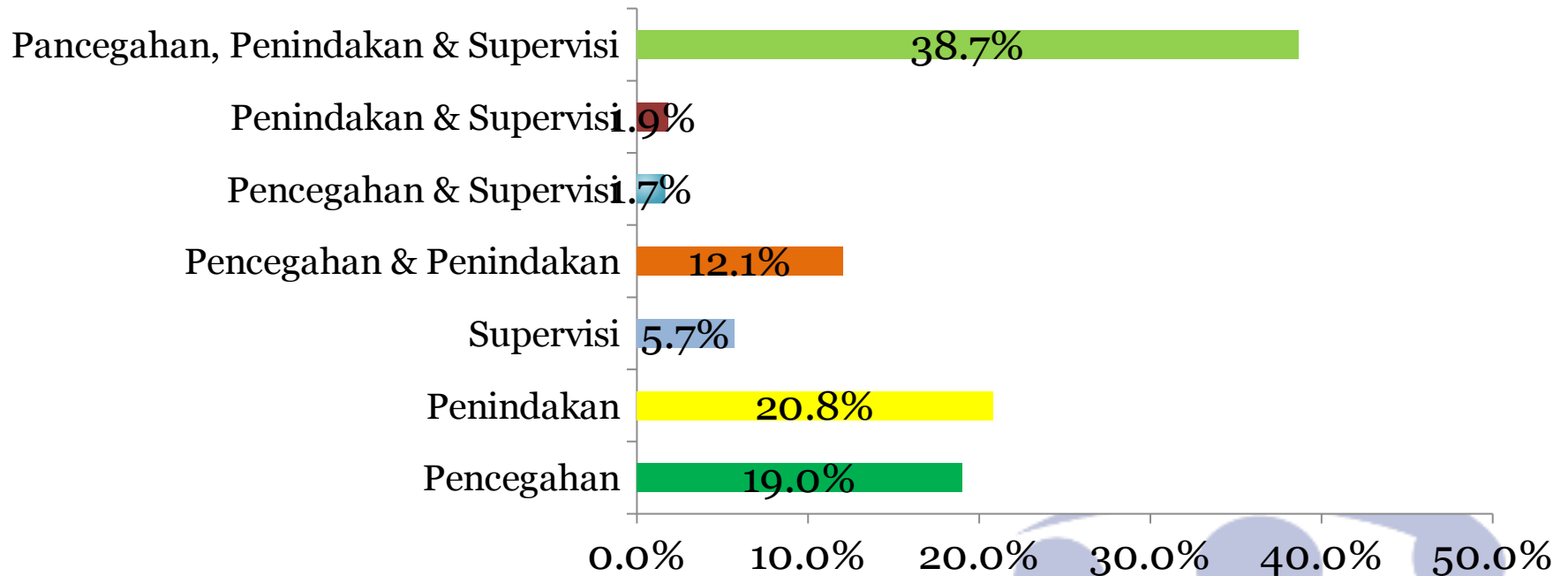


Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia?



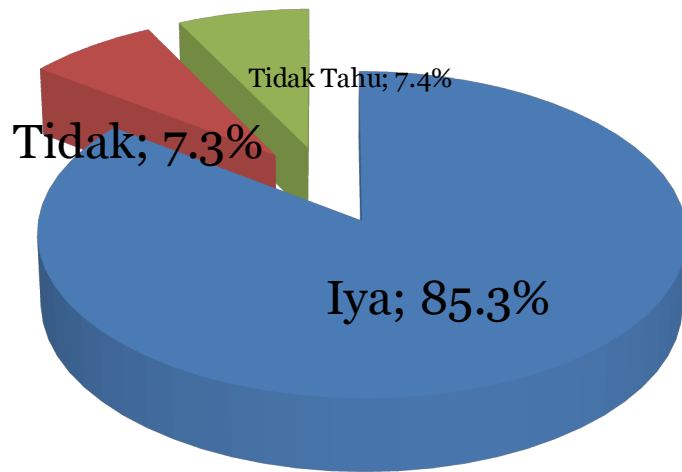
Grafik diatas memperlihatkan bagaimana penilaian yang diberikan masyarakat atas kinerja lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan KPK) dalam pemberantasan korupsi dari yang terendah 1 sampai 10 yang tertinggi. Ternyata rata-rata nilai yang diberikan masyarakat terhadap kepolisian adalah 5,3, untuk kejaksaan 5,6, dan untuk KPK 7,8. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat masih menganggap bahwa KPK lebih baik menangani kasus korupsi dibandingkan dengan kepolisian dan kejaksaan.

KPK memiliki fungsi pencegahan, penindakan, dan supervisi, menurut anda fungsi mana yang harus menjadi fokus kerja KPK?



Dari ketiga fungsi yang dimiliki oleh KPK, yaitu pencegahan, penindakan, dan supervisi, masyarakat paling banyak menganggap bahwa ketiga fungsi yang KPK miliki saat ini (pencegahan, penindakan, dan supervisi) harus menjadi fokus kerja KPK ada sebanyak 38,7%, kemudian ada sebanyak 20,8% responden yang menyatakan fungsi penindakan yang menjadi fokus kerja KPK, sebanyak 19% menyatakan fungsi pencegahan yang menjadi fokus kerja KPK.

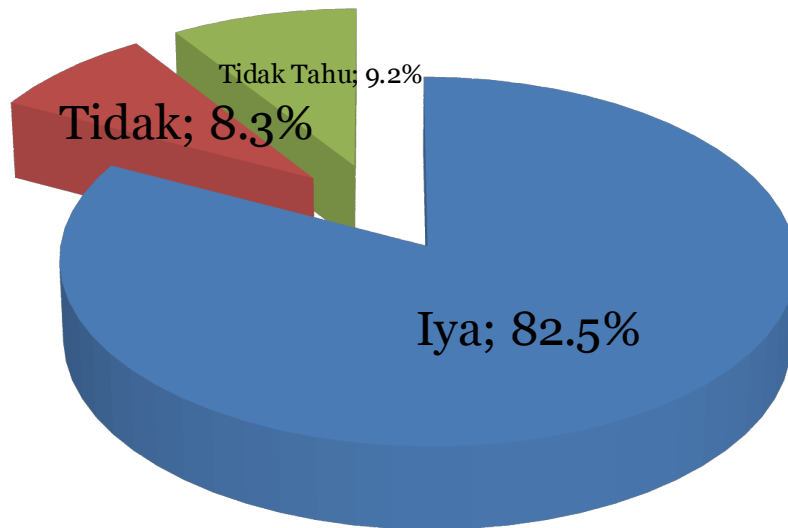
Menurut anda, apakah KPK perlu memiliki kewenangan penyadapan dalam pemberantasan korupsi?



Grafik di samping menggambarkan bagaimana pandangan masyarakat terhadap kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan.

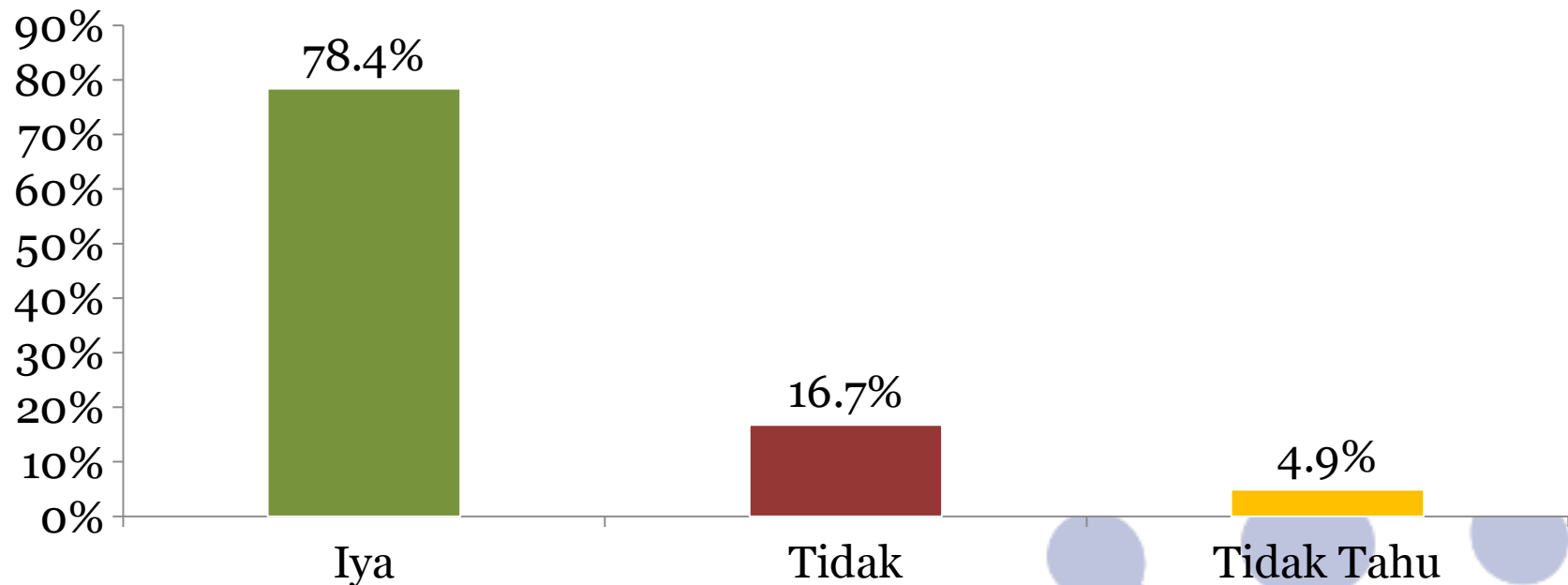
Dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat, sebanyak 85,3%, menyatakan KPK perlu memiliki kewenangan penyadapan dan hanya 7,3% yang menyatakan tidak perlu dan tidak tahu apakah KPK perlu memiliki kewenangan penyadapan

Menurut anda, apakah KPK perlu merekrut penyidik & penyelidik independen?

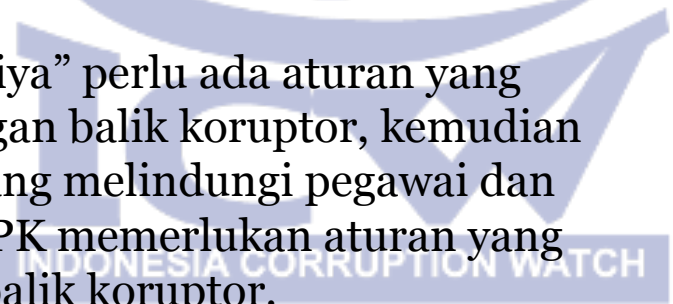


Menurut masyarakat sebanyak 82,5% menyatakan bahwa KPK perlu merekrut penyidik dan penyelidik independen, sebanyak 8,3% menyatakan KPK tidak perlu merekrut penyidik dan penyelidik independen dan 9,2% menyatakan tidak tahu apakah KPK perlu merekrut penyidik dan penyelidik independen.

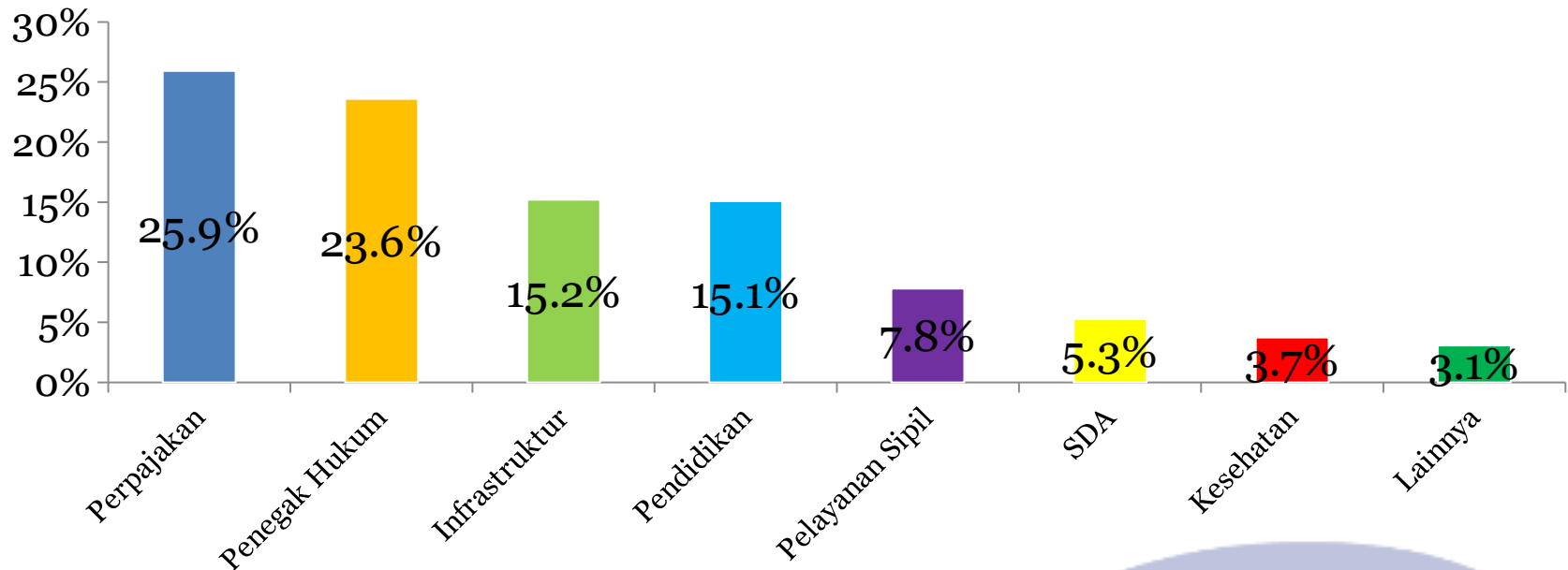
Menurut anda, apakah perlu ada aturan yang melindungi pimpinan atau pegawai KPK dari serangan balik koruptor karena menangani kasus korupsi?



Sebagian besar masyarakat, yaitu 78,4%, menyatakan “iya” perlu ada aturan yang melindungi pimpinan maupun pegawai KPK dari serangan balik koruptor, kemudian sebanyak 16,7% menyatakan “tidak” perlu ada aturan yang melindungi pegawai dan serangan balik koruptor, dan 4,9% tidak tahu apakah KPK memerlukan aturan yang melindungi pimpinan dan pegawai KPK dari serangan balik koruptor.

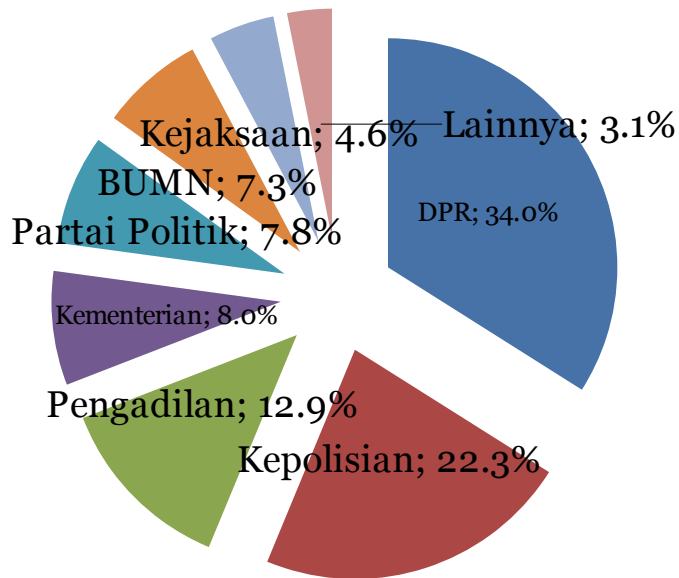


Menurut anda, sektor apa yang harus jadi prioritas dalam pemberantasan korupsi oleh KPK?



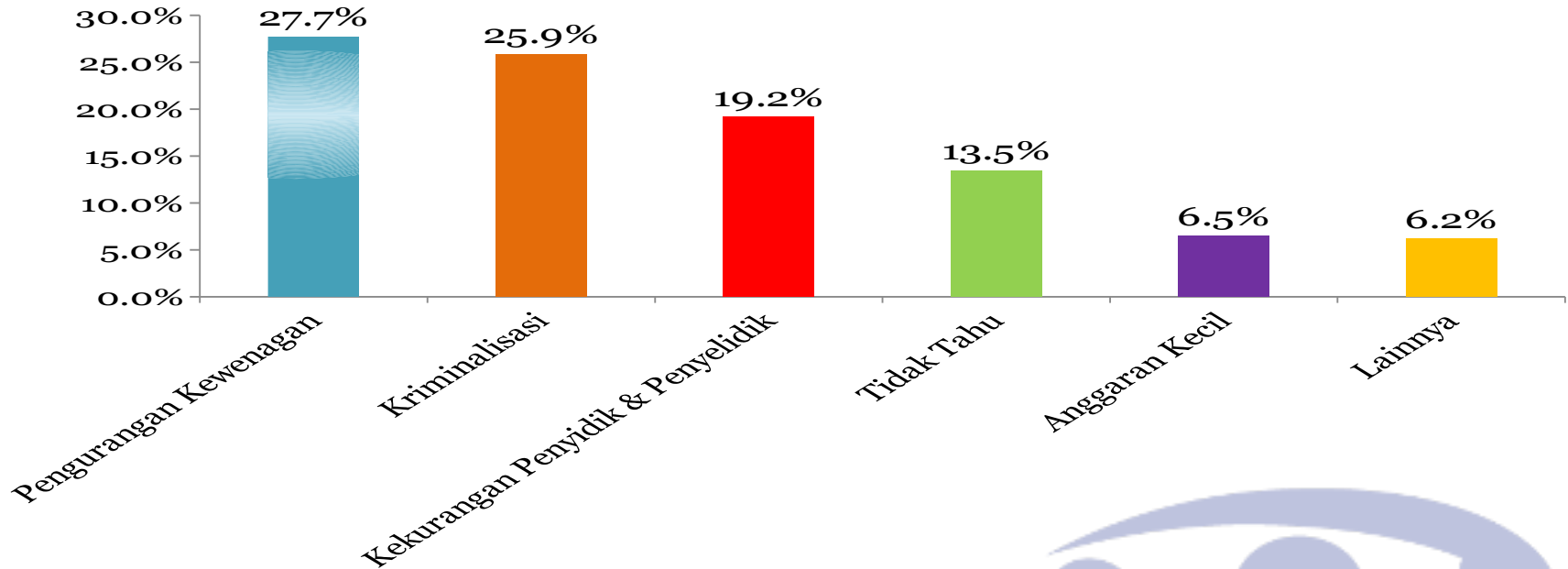
Sektor yang paling banyak dianggap melakukan korupsi adalah sektor perpajakan sebanyak 33.3%, kemudian di sektor penegakan hukum sebesar 23,6%, dan infrastuktur sebesar 15,2%. Pendidikan mendapatkan peringkat ke empat sektor yang harus menjadi prioritas dalam pemberantasan korupsi dan kelima adalah sektor pelayanan sipil sebesar 7,8%.

Menurut anda, institusi mana yang paling dulu harus di bersihkan oleh KPK?

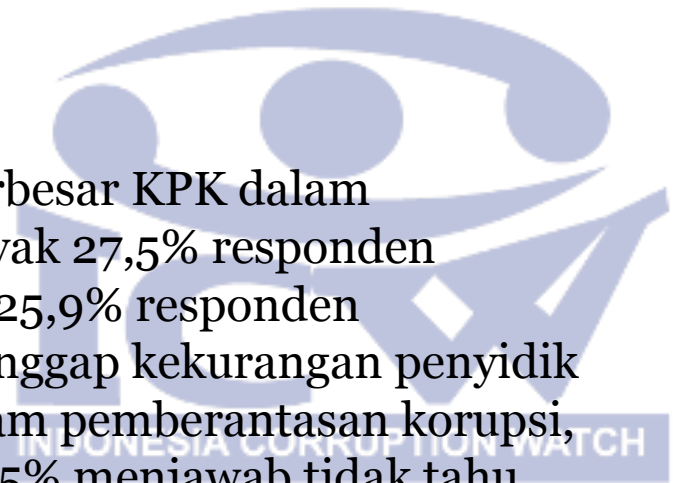


Menurut masyarakat, institusi yang paling dulu harus dibersihkan oleh KPK pertama adalah DPR 34,0% kemudian sebanyak 22,3% menganggap bahwa institusi kepolisian yang harus menjadi prioritas pemberantasan korupsi dan institusi ketiga yang harus menjadi prioritas adalah pengadilan yaitu sebanyak 12,9%.

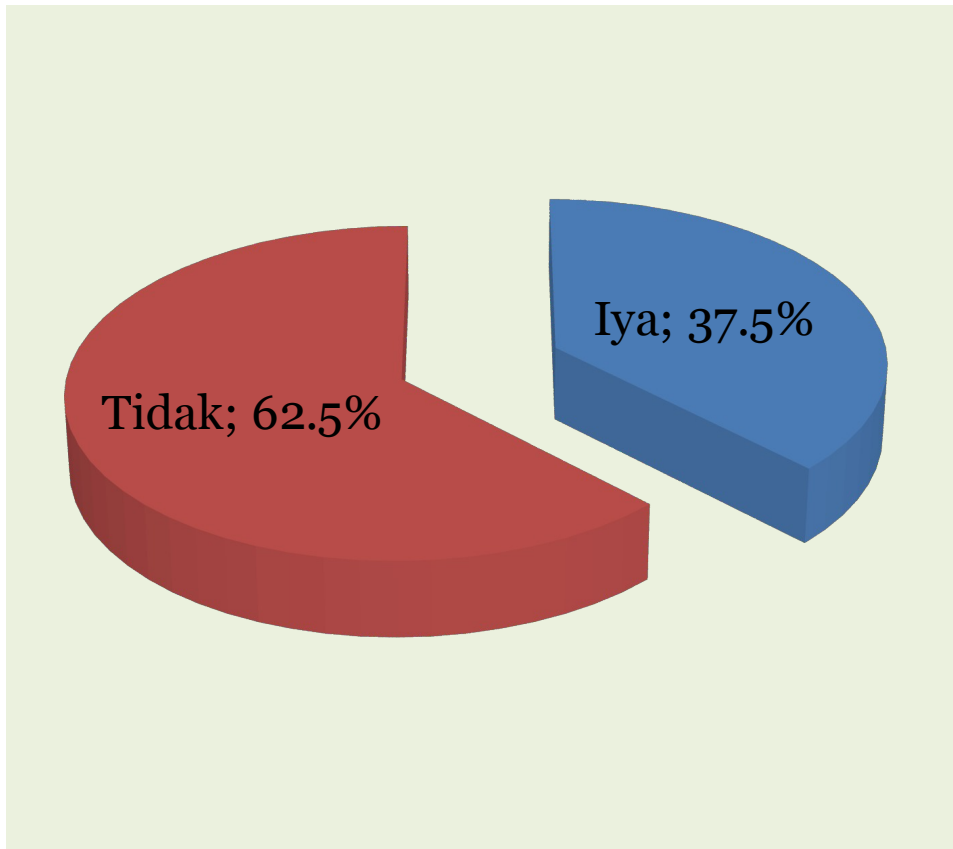
Menurut anda, apa tantangan terbesar KPK dalam pemberantasan korupsi saat ini?



Berdasarkan pandangan masyarakat, tantangan terbesar KPK dalam pemberantasan korupsi yang dihadapi KPK, sebanyak 27,5% responden menganggap pengurangan kewenangan, sebanyak 25,9% responden menganggap kriminalisasi, sebanyak 19,2% menganggap kekurangan penyidik dan penyelidik adalah tantangan terbesar KPK dalam pemberantasan korupsi, sebanyak 6,5% menganggap anggaran kecil dan 13,5% menjawab tidak tahu.

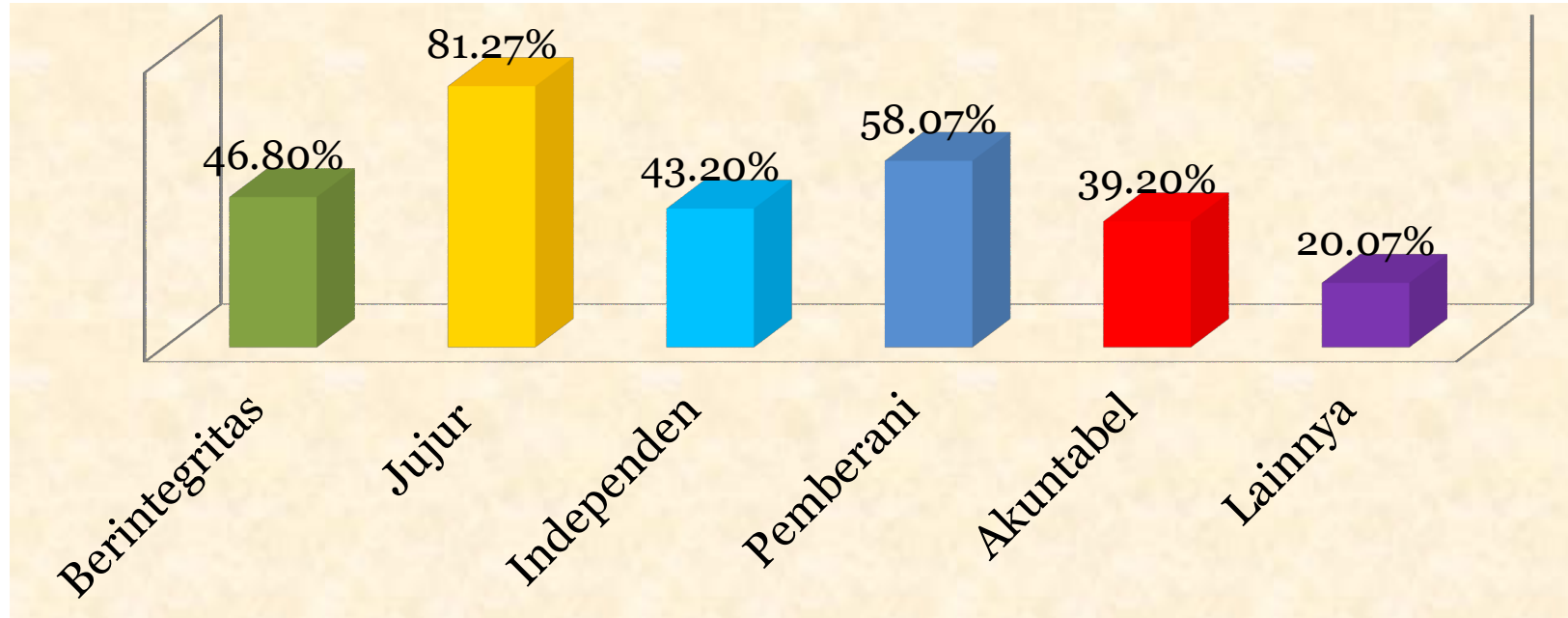


Apakah anda mengetahui proses seleksi calon pimpinan KPK yang dilakukan oleh pemerintah?



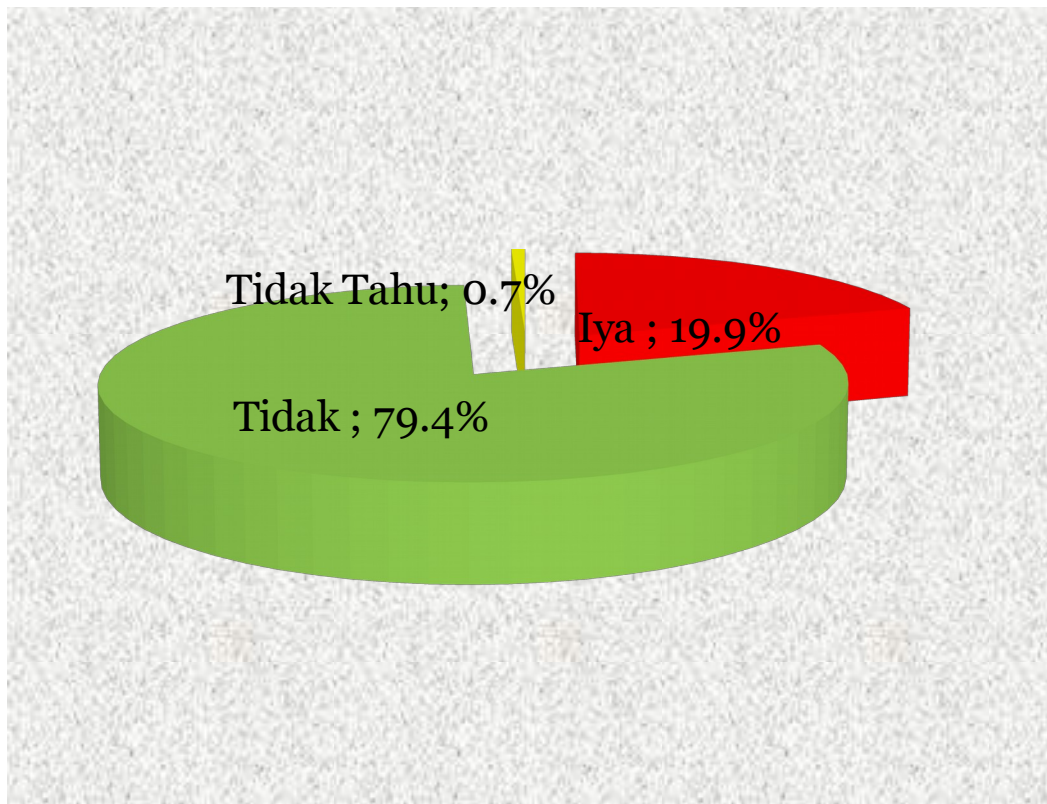
Berdasarkan grafik di samping terlihat bahwa masyarakat yang mengetahui proses seleksi calon pimpinan KPK hanya sebesar 37,5% dan yang tidak mengetahui ada sebanyak 62,5%. Sehingga dapat dikatakan bahwa isu tentang seleksi calon pimpinan KPK tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat umum.

Menurut anda, apa kriteria untuk menjadi pimpinan KPK?



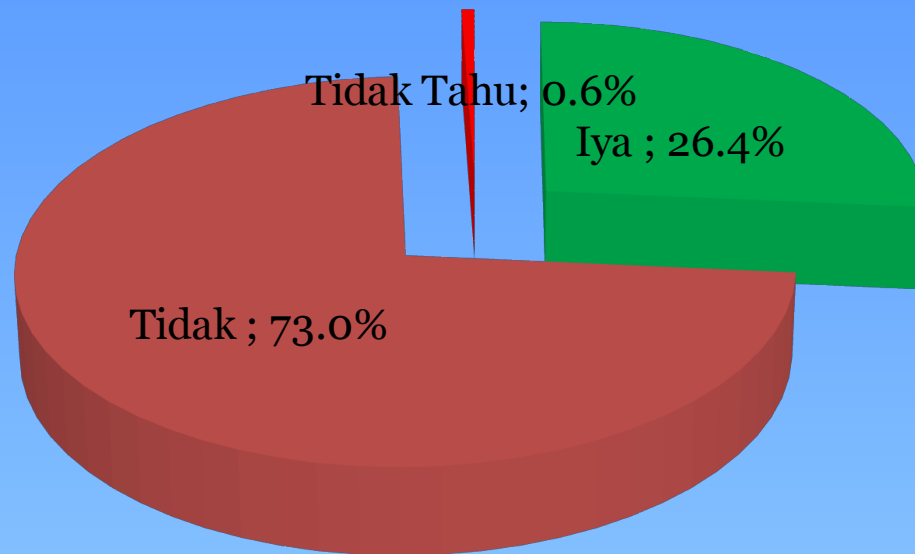
Grafik di atas memperlihatkan bagaimana kriteria pimpinan KPK menurut masyarakat. Responden diminta untuk memilih (boleh menyebutkan lebih dari 1 kriteria). Berdasarkan grafik di atas, kriteria yang paling banyak diinginkan oleh masyarakat sebagai pimpinan KPK adalah jujur (81,27%), kemudian berani (58,07%), dan berintegritas (46,8%).

Menurut anda, apakah latar belakang pimpinan KPK harus ada yang berasal dari kepolisian?

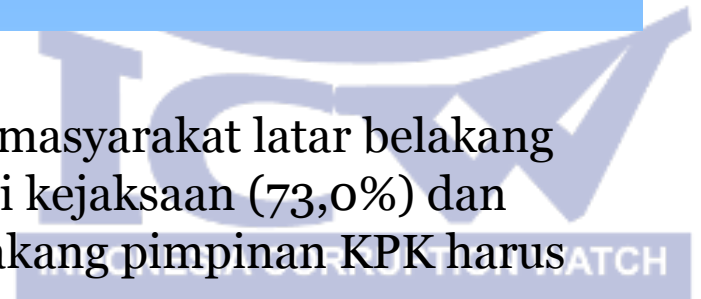


Grafik di samping memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat berpandangan bahwa latar belakang pimpinan KPK tidak harus berasal dari kepolisian (79,4%) dan hanya 19,9% yang menganggap bahwa latar belakang pimpinan KPK harus ada yang berasal dari kepolisian.

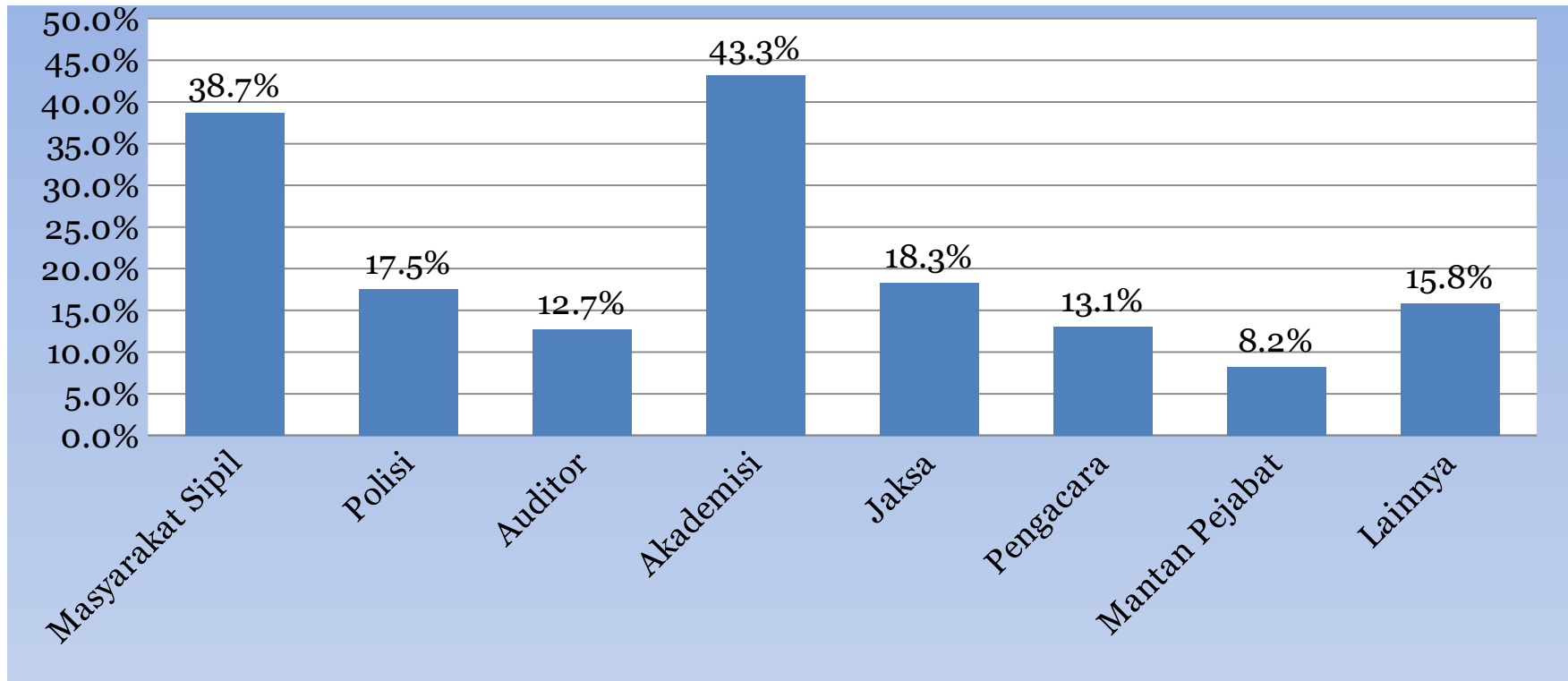
Menurut anda, apakah latar belakang pimpinan KPK harus ada yang berasal dari kejaksaan?



Grafik di atas memperlihatkan bahwa menurut masyarakat latar belakang pimpinan KPK tidak harus ada yang berasal dari kejaksaan (73,0%) dan hanya 26,4% yang menyatakan bahwa latar belakang pimpinan KPK harus ada yang berasal dari kejaksaan.

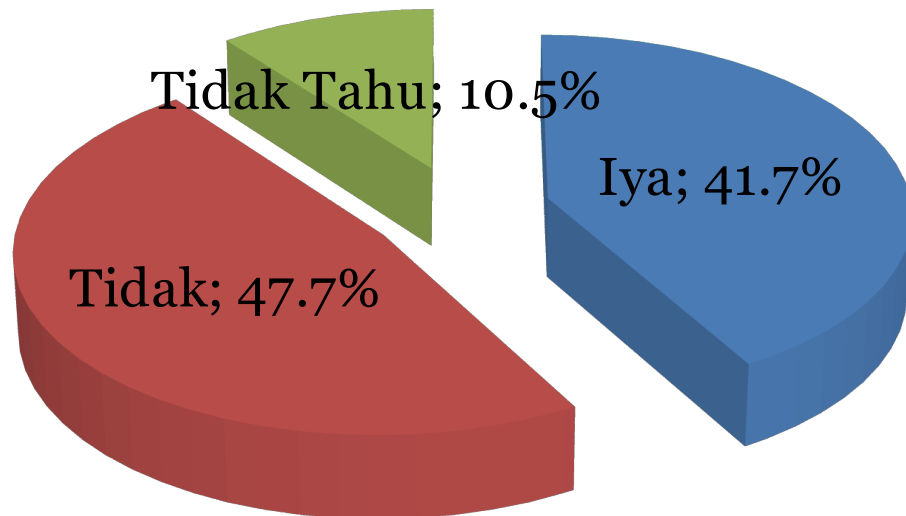


Menurut anda sebaiknya latar belakang Pimpinan KPK berasal dari:



Grafik di atas memperlihatkan bagaimana kriteria latar belakang pimpinan KPK menurut masyarakat. Dari pilihan responden (boleh memilih lebih dari 1 kriteria) menyatakan latar belakang pimpinan KPK sebaiknya berasal dari akademisi sebanyak 43,3%, berikutnya berasal dari masyarakat sipil sebanyak 38,7%.

Menurut Anda, apakah proses pemilihan pimpinan KPK harus melibatkan DPR?



Ternyata 47,7% responden menyatakan bahwa proses pemilihan pimpinan KPK tidak harus melalui DPR dan 41,7% menyatakan bahwa proses seleksi calon pimpinan DPR harus melalui DPR dan hanya 10,5% yang menyatakan tidak tahu apakah proses seleksi harus melalui DPR.

Kesimpulan:

Dari hasil survei yang dilakukan oleh ICW pada 5 kota besar (1.500 responden) terkait pandangan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari 97,7% responden menyatakan membutuhkan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Terkait dengan keberadaan, masyarakat juga menilai kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi lebih baik dibandingkan dua APH yang lain (Kejaksaan, Kepolisian). Masyarakat memberi KPK nilai 7,8 (skala 0 -10), sementara Kejaksaan 5,6 dan Kepolisian 5,3
3. Terkait peran dan kewenangan KPK:
 - Fungsi pencegahan, penindakan, dan supervisi dianggap harus menjadi fokus kerja KPK (38,7% responden menyatakan KPK harus fokus pada 3 fungsi ini, sementara yang menekankan pada fungsi penindakan saja 20,8%).
 - Fungsi kewenangan penyadapan yang ada pada KPK harus dipertahankan. Ini terlihat dari 85,3% responden menyatakan KPK harus memiliki kewenangan penyadapan dalam kerja pemberantasan korupsi.
 - Peran penyelidik dan penyidik KPK juga mendapat respon sangat positif dari masyarakat, dimana 82,5% menyatakan KPK perlu merekrut penyelidik dan penyidik independen (diluar dari kejaksaan dan kepolisian).
 - Usulan untuk melindungi KPK dari “serangan balik” juga mendapat dukungan besar dari masyarakat, dimana 78,4% responden menyatakan perlu ada kebijakan yang melindungi pimpinan/pegawai KPK dari “serangan balik koruptor”.

Kesimpulan-Lanjutan:

4. Sektor atau institusi yang harus jadi fokus kerja KPK dalam pemberantasan korupsi:
 - Sektor yang harus menjadi prioritas KPK dalam pemberantasan korupsi adalah perpajakan, penegakan hukum, infrastruktur, dan pendidikan.
 - Institusi yang harus menjadi perhatian KPK dalam pemberantasan korupsi di antaranya DPR, Kepolisian, dan Pengadilan.
5. Tantangan terbesar KPK dalam pemberantasan korupsi saat ini, responden menyatakan pengurangan kewenangan adalah tantangan terbesar KPK saat ini. Kemudian “tantangan” menyangkut kriminalisasi, kekurangan penyidik, dan penyidik.
6. Proses seleksi dan kriteria pimpinan KPK dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Hanya 37,5% responden mengetahui adanya proses seleksi capim KPK oleh pemerintah. Artinya mayoritas responden tidak mengetahui/mengikuti proses seleksi capim KPK.
 - Terkait dengan proses pemilihan KPK oleh DPR, mayoritas responden menyatakan tidak perlu melalui DPR (47,7%) sedangkan yang menyatakan perlu lewat DPR (41,7%)
 - Terkait dengan kriteria pimpinan KPK, mayoritas responden menyatakan jujur adalah kriteria utama di samping pemberani, berintegritas, dan independen.
 - Sementara terkait soal latar belakang pimpinan KPK, mayoritas responden menyatakan pimpinan KPK tidak harus berlatar belakang kepolisian (79,4%), begitu juga tidak harus berlatar belakang kejaksaan (73,0%)

Terimakasih

Indonesia Corruption Watch (ICW) – 2015

Peneliti:

- Siti Juliantari Rahman,
 - Mouna Wasef,
 - Febri Hendri AA,
 - Firdaus Ilyas